

EFEKTIVITAS KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DALAM PENERBITAN SIRAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) DI KABUPATEN SORONG SELATAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Nolita S. Maraki

NPP. 31.1092

Asdaf Kabupaten Sorong Selatan

Program Studi Keuangan Publik

Email: marakinolitasinta@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Fitri Yul Dewi Marta, S.IP.,M.Si

ABSTRACT

Problem (GAP): This research explores Financial Management in the Issuance of Fund Disbursement Orders (SP2D) at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of South Sorong Regency. There are several obstacles that need attention. First, it was discovered that there were errors or incompleteness of the SP2D documents submitted by the Regional Apparatus Organization (OPD). This has the potential to hamper the process of disbursing funds. Second, SP2D returns are another obstacle faced, triggered by data errors and document completeness. Third, the imperfect application of the Regional Financial Management Information System (SIPD) also hinders the smooth process of issuing SP2D. **Purpose:** is to analyze in depth the SP2D publishing process and identify the obstacles faced in its implementation. **Method:** This research uses qualitative methods with data collection techniques through observation, interviews and documentation implemented in this research. **Result/Findng:** This research recommends several strategic steps to overcome existing obstacles. First, South Sorong Regency BPKAD needs to conduct comprehensive outreach to OPD regarding the procedures and requirements for issuing SP2D. Second, build a database of fund recipients and periodically validate fund recipient data prevent SP2D returns. Third, it is necessary to provide technical guidance to BPKAD officers regarding the use of the SIPD application to ensure the smooth running and optimization of the system. **Conclusion:** by implementing these recommendations, it is hoped that the SP2D issuance system in BPKAD South Sorong Regency can run more effectively, efficiently and accountably, thus supporting the smooth distribution of funds and realizing better regional financial governance.

Keywords: SP2D Publishing, Financial Management

ABSTRAK

Pemasalahan(GAP): Penelitian ini menyelami Pengelolaan Keuangan dalam Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sorong Selatan. Dimana beberapa kendala yang perlu mendapat perhatian. Pertama, ditemukan adanya kekeliruan atau ketidaklengkapan dokumen SP2D yang diajukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini berpotensi menghambat proses pencairan dana. Kedua, retur SP2D menjadi kendala lain yang dihadapi, dipicu oleh kekeliruan data dan kelengkapan dokumen. Ketiga, aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPD) yang belum sempurna juga turut menghambat kelancaran proses penerbitan SP2D. **Tujuan:** utamanya adalah untuk menganalisis secara mendalam proses penerbitan SP2D dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi diimplementasikan dalam penelitian ini. **Hasil/Temuan:** penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis untuk mengatasi kendala yang ada. Pertama, BPKAD Kabupaten Sorong Selatan perlu menyelenggarakan sosialisasi secara menyeluruh kepada OPD terkait prosedur dan persyaratan penerbitan SP2D. Kedua, membangun database penerima dana dan melakukan validasi data penerima dana secara berkala untuk mencegah terjadinya retur SP2D. Ketiga, perlu dilakukan pembinaan teknis kepada petugas BPKAD terkait penggunaan aplikasi SIPD untuk memastikan kelancaran dan optimalisasi sistem. **Kesimpulan:** dengan menerapkan rekomendasi tersebut, diharapkan sistem penerbitan SP2D di BPKAD Kabupaten Sorong Selatan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga mendukung kelancaran penyaluran dana dan mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik

Kata Kunci: Penerbitan SP2D, Pengelolaan Keuangan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kinerja pengelolaan keuangan mencerminkan keseluruhan rangkaian tindakan dalam pengaturan keuangan daerah. Pengelolaan ini melibatkan langkah-langkah seperti perencanaan, anggaran, pelaksanaan, administrasi, pertanggungjawaban, pelaporan, dan pengawasan keuangan daerah yang harus dilakukan secara terstruktur, efisien, dan efektif dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Surat perintah pencairan dana (SP2D) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kuasa BUD berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran SKPD dilingkungan pemerintah kab jember untuk mencairkan dana lewat bank. Dengan terlebih dahulu dilakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran lampiran SPM. SP2D satu SPM hanya bisa dibuat untuk satu SP2D dan/atau sebaliknya, dalam melakukan satu pencairan dan pada suatu kegiatan.

Pasca krisis ekonomi 1998, Indonesia melakukan reformasi di berbagai bidang, termasuk bidang keuangan. Pemerintah mengganti seluruh peraturan keuangan negara yang lama dengan peraturan baru yang lebih modern dan akuntabel. Peraturan baru tersebut di antaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara. Dengan dasar hukum pengelolaan keuangan daerah yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Perkembangan suatu daerah sangat dipengaruhi oleh bagaimana keuangan daerah dikelola dengan baik. Pengelolaan keuangan daerah mencakup seluruh aktivitas yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan dana publik. Pengelolaan ini harus dilakukan dengan disiplin, mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku, efektif, efisien, hemat, transparan, serta dengan tanggung jawab yang memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, kesesuaian, dan manfaat bagi masyarakat.

Kewajiban pemerintah daerah dalam menjelaskan pencapaian kinerja keuangan mereka menuntut transparansi yang tinggi. Penilaian kinerja ini harus memberikan informasi yang

mudah dipahami oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam memantau bagaimana pemerintah daerah mengelola keuangan mereka. Seperti yang sudah dikenal, untuk memperoleh dana dari SP2D, suatu dinas harus mengikuti serangkaian prosedur yang dimulai dari pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), hingga pelaksanaan pengeluaran. Dimana dasar hukum terkait penerbitan surat perintah pencairan dana ini sesuai dengan peraturan daerah itu sendiri yakni Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun Anggaran 2021, dalam Bab IV tentang Pengelolaan Belanja Pasal 16 “Pengeluaran daerah dilakukan dengan menggunakan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)” dan ayat 1 yang berbunyi “SP2D diterbitkan oleh PA kepada Bendahara Pengeluaran” serta ayat 2 yang berbunyi “SP2D harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”.

Proses pengujian SP2D sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang akan dicairkan benar-benar digunakan sesuai anggaran dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Sorong Selatan memiliki peran krusial dalam memverifikasi kebenaran dan keabsahan permintaan dana yang diajukan oleh dinas, terutama kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sorong Selatan. Dalam meningkatkan efektivitas penerbitan SP2D di BPKAD Sorong Selatan. Data pendukung yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas penerbitan SP2D di BPKAD Sorong Selatan adalah Waktu penyelesaian penerbitan SP2D, Jumlah SP2D yang diterbitkan, dan Anggaran yang dicairkan. Data pendukung tersebut dapat dikumpulkan untuk setiap bulan dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau dengan BPKAD lain di Provinsi Papua Barat Daya.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam hal pengelolaan keuangan yang menjadi topoksi OPD terkait. Dimana Proses pengujian SP2D sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang akan dicairkan benar-benar digunakan sesuai anggaran dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Sorong

Selatan memiliki peran krusial dalam memverifikasi kebenaran dan keabsahan permintaan dana yang diajukan oleh dinas, terutama kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sorong Selatan. Sehingga dalam penelitian ini permasalahan yang diambil yakni terkait efektivitas pengelolaan keuangan dalam penerbitan SP2D, penghambat pengelolaan keuangan dalam penerbitan SP2D, serta upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dalam penerbitan SP2D.

1.3. Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Syafri (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Akuntabilitas Pelayanan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Takalar”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian adalah peneliti menyimpulkan bahwa layanan yang disediakan oleh aparat di BPKAD Kabupaten Takalar dinilai cukup memuaskan, terutama dalam hal penerbitan SP2D. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja aparat terhadap masyarakat dapat dipertanggungjawabkan dengan baik kepada pimpinan, terutama kepada masyarakat yang memiliki kepentingan dalam pengurusan SP2D tersebut. Kedua, Brigita Erika Montolalu (2022) NPP. 29.1483 dalam penelitiannya yang berjudul “Kinerja Keuangan Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara”. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk tercapainya kinerja keuangan daerah Kabupaten Minahasa yang baik, tentu harus didukung dengan adanya faktor serta upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam pelaksanaan kinerja keuangan. Ketiga, Anastasia Ivana Ngangi, Sri Murni, Victoria N. Untu(2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan”. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan beberapa rasio keuangan daerah, seperti rasio kemandirian, rasio efisiensi, rasio desentralisasi, rasio pertumbuhan, dan rasio kesesuaian belanja modal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sorong Selatan mengalami perkembangan yang baik dalam pengelolaan keuangan selama periode tersebut. Namun, masih ada tantangan yang

perlu diatasi, seperti ketergantungan pada pemerintah pusat dan perlunya peningkatan desentralisasi untuk memberikan lebih banyak kewenangan kepada pemerintah daerah. Keempat, Kisman Lantang (2010) dalam penelitiannya yang berjudul “Sistem Pencairan Dana Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Poso”. Data dianalisis menggunakan metode distribusi frekuensi. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun proses pencairan dana telah mengikuti prosedur yang benar, kinerja pegawai yang terlibat dalam proses tersebut belum mencapai tingkat optimal. Akibatnya, tingkat kepuasan masyarakat terhadap proses pencairan dana masih rendah. Kelima, Bustan (2007) telah menguji secara parsial, dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Parepare.” Dengan Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan kuisioner menghasilkan temuan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh negative terhadap keterlambatan penerbitan SP2D, atau dengan kata lain apabila SDM yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan meningkat, akan menurunkan keterlambatan penerbitan SP2D sedangkan sarana computer mempengaruhi secara negatif terhadap penerbitan SP2D, dengan kata lain jika sarana komputer ditingkatkan, maka akan menurunkan keterlambatan penerbitan SP2D. Keenam, Magdalena Idda Kusumaningsih, (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pada Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Bulungan”, dengan menggunakan desain penelitian yang berlandaskan paradigma kuantitatif dengan filsafat positivisme mendapatkan hasil bahwa, kualitas sumber daya manusia mempengaruhi secara signifikan kualitas penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana pada Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bulungan. Kualitas sumber daya manusia yang menangani proses pelayanan penerbitan SP2D yang memiliki tanggung jawab, Pendidikan dan pelatihan yang sesuai, dan pengalaman kerja yang cukup akan meningkatkan pelayanan penerbitan SP2D yang relevan, handal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami oleh pengguna (user). Lalu teknologi informasi mempengaruhi secara kualitas penerbitan SP2D pada Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bulungan.

30 Teknologi informasi dalam bentuk pemanfaatan sistem informasi dan komputerisasi

yang memadai dan pemanfaatan jaringan internet akan meningkatkan pelayanan penerbitan SP2D yang relevan, handal, dapat dibandingkan dan dipahami oleh pengguna (user). Semakin unsur-unsur itu digunakan dan diterapkan akan semakin meningkatkan proses penerbitan SP2D tersebut.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan yang terbaru serta informan yang lebih luas. GAP penelitian juga hanya ada dalam merupakan masalah yang khusus terjadi di lokus penulis

1.5. Tujuan

Untuk mengetahui efektivitas kinerja, faktor-faktor penghambat pengelolaan keuangan serta upaya apa yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Daya

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif oleh Bogdan dan Taylor (Moleong, 2017:6) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif dan pendekatan induktif yaitu penelitian yang berusaha untuk menggambarkan suatu fenomena atau masalah berdasarkan data-data yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kondisi penelitian berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan didapatkan sehingga penulis dapat menarik kesimpulan penelitian yang bermakna. Dalam penelitian ini, penulis menghimpun data dengan melakukan teknik yang meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi (Sugiyono, 2018). Dengan teknis analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, serta kesimpulan dan verifikasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis untuk penyelesaian penulisan skripsi, yang berjudul Efektivitas Pengelolaan Dalam Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di Kabupaten Sorong Selatan. Penulis memecahkan masalah dengan menggunakan pandangan Brown et.al. dalam Wanarto (2013) yang menyatakan untuk mengukur suatu efektivitas dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu, kompetensi teknis, akses terhadap pelayanan, hubungan interpersonal, dan kenyamanan.

3.1. Efektivitas Kinerja Pengelolaan Keuangan dalam Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana

Efektivitas kinerja pengelolaan keuangan dalam penerbitan SP2D merujuk pada sejauh mana proses tersebut dapat mencapai tujuan yang ditetapkan dengan cara yang efisien dan efektif. Ini melibatkan berbagai aspek, termasuk pengelolaan anggaran dengan tepat, pemenuhan persyaratan administratif, kepatuhan terhadap regulasi keuangan yang berlaku, serta penerbitan SP2D dengan tepat waktu dan akurat. Faktor-faktor seperti pengelolaan data yang baik, transparansi dalam penggunaan dana, serta kepatuhan terhadap standar akuntansi dan audit juga penting dalam menilai efektivitas kinerja pengelolaan keuangan dalam penerbitan SP2D. Dengan menjaga efektivitas ini, entitas atau lembaga yang terlibat dapat memastikan bahwa sumber daya keuangan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung berbagai program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.

3.1.1. Pelayanan Penerbitan SP2D

Evaluasi terhadap pelayanan penerbitan SP2D mencakup efisiensi dalam proses, responsif terhadap permintaan, dan ketersediaan bantuan teknis kepada pengguna. Jika terdapat hambatan dalam pelayanan, seperti keterlambatan dalam menanggapi permintaan atau ketidakjelasan dalam prosedur, hal ini dapat mengurangi kepuasan pengguna dan menghambat efektivitas proses secara keseluruhan.

3.1.2. Akurasi Data dalam Pemberkasan

Akurasi data dalam pemberkasan menjadi kunci dalam memastikan kebenaran informasi

yang disampaikan dalam SP2D. Ketidakakuratan data dapat menyebabkan kesalahan dalam penyelesaian SP2D, yang dapat mengganggu arus kas dan menyebabkan masalah administratif lebih lanjut.

3.1.3. Waktu Penerbitan/Penyelesaian SP2D

Waktu yang dibutuhkan untuk menerbitkan dan menyelesaikan SP2D adalah indikator penting dalam mengukur efisiensi proses. Keterlambatan dalam penerbitan SP2D dapat mempengaruhi kegiatan operasional dan mengganggu aliran kas organisasi.

3.1.4. Sarana dan Prasarana dalam Pembuatan SP2D

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, seperti perangkat keras dan lunak yang diperlukan, ruang kerja yang nyaman, dan aksesibilitas terhadap sistem informasi keuangan, sangat penting dalam mendukung efektivitas proses penerbitan SP2D. Kekurangan dalam sarana dan prasarana dapat menghambat kinerja dan menyebabkan ketidaknyamanan bagi staf yang terlibat.

3.1.5. Kemampuan Pegawai dalam Menghadapi Hambatan dalam Penerbitan SP2D

Kemampuan pegawai untuk mengatasi hambatan dalam penerbitan SP2D, seperti kendala administratif atau teknis, dapat memengaruhi produktivitas dan efisiensi proses. Pelatihan dan pengembangan keterampilan yang tepat dapat membantu meningkatkan kemampuan staf dalam menangani tantangan yang muncul.

3.1.6. Kepuasan dalam Pelayanan SP2D yang Diberikan

Kepuasan pengguna dalam pelayanan SP2D mencerminkan sejauh mana kebutuhan dan harapan mereka terpenuhi. Melalui survei kepuasan atau umpan balik langsung dari pengguna, organisasi dapat mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan.

3.2. Faktor Penghambat Kinerja Pengelolaan Keuangan dalam Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana

Faktor yang menghambat kinerja pengelolaan keuangan dalam penerbitan SP2D. Penghambat ini bisa berupa masalah administratif, kurangnya kompetensi teknis di

kalangan personel terkait, keterbatasan sumber daya. Untuk memahami lebih lanjut tentang hambatan-hambatan yang memengaruhi kinerja pengelolaan keuangan dalam penerbitan SP2D, perlu ada identifikasi faktor-faktor yang menghalangi efisiensi efektivitas proses penerbitan SP2D tersebut.

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan seperti masalah administratif, kurangnya kompetensi teknis, dan keterbatasan sumber daya, terdapat beberapa hambatan tambahan yang dapat memengaruhi kinerja pengelolaan keuangan dalam penerbitan SP2D. Salah satunya adalah ketidakmampuan dalam mengadopsi teknologi informasi yang tepat untuk mendukung proses administratif dan pengelolaan data keuangan. Kurangnya infrastruktur teknologi yang memadai atau kurangnya investasi dalam pengembangan sistem informasi keuangan dapat menjadi penghambat serius dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi proses penerbitan SP2D. Selain itu, faktor budaya organisasi juga dapat menjadi penghambat, seperti resistensi terhadap perubahan, kurangnya komunikasi dan koordinasi antarunit, serta kecenderungan untuk mempertahankan praktik-praktik lama yang tidak efisien.

Dengan memahami hambatan-hambatan ini secara lebih mendalam, sebuah organisasi dapat mengidentifikasi strategi perbaikan yang tepat untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dalam penerbitan SP2D, sehingga dapat mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dengan lebih efektif.

3.3. Upaya Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan dalam Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana

Dalam pembahasan ini akan mencakup rekomendasi dan upaya-upaya yang diusulkan untuk meningkatkan efektivitas kinerja pengelolaan keuangan dalam penerbitan SP2D di Kabupaten Sorong Selatan. Ini mencakup perbaikan dalam proses administratif, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta penguatan mekanisme pengawasan dan kontrol.

Upaya perbaikan dalam efektivitas kinerja pengelolaan keuangan dalam penerbitan SP2D di Kabupaten Sorong Selatan memerlukan langkah-langkah strategis yang komprehensif. Pertama, diperlukan perbaikan dalam proses administratif, termasuk penyederhanaan prosedur dan pengurangan birokrasi yang tidak perlu untuk

mempercepat proses penerbitan SP2D. Selanjutnya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kunci, melalui pelatihan dan pendidikan yang intensif untuk meningkatkan keterampilan teknis dan pengetahuan terkait dengan pengelolaan keuangan dan penggunaan teknologi informasi.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat / Golongan	Jumlah Pegawai
1	Pembina IV/a	5
2	Pembina Tk.I IV/b	1
3	Penata Tk. I / III d	8
4	Penata III/c	7
5	Penata III/b	1
6	Penata Muda Tk. I / III b	2
7	Penata Muda / III a	10
8	Pengatur / I c	2
9	Pengatur Muda Tk. I / II b	7
10	Pengatur Muda / I a	5
11	Juru Tk. I / I d	2
12.	Juru / I c	-
13.	Juru Muda Tkt. I / I b	-
Total		50 Orang

Selain itu, penerapan teknologi informasi yang tepat dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penerbitan SP2D, sehingga memungkinkan pemantauan yang lebih efektif oleh pihak terkait. Terakhir, penguatan mekanisme pengawasan dan kontrol merupakan langkah penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan penyelewengan dana, dengan memastikan bahwa setiap tahap dalam proses penerbitan SP2D dilakukan sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku. Dengan mengimplementasikan upaya-upaya ini secara berkelanjutan, diharapkan efektivitas kinerja pengelolaan keuangan dalam penerbitan SP2D di Kabupaten Sorong Selatan dapat meningkat, menciptakan tata kelola keuangan yang lebih baik dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

3.4. Diskusi Utama Temuan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengeksplorasi efektivitas kinerja pengelolaan keuangan dalam penerbitan SP2D di Kabupaten Sorong Selatan, sebuah wilayah dengan potensi

ekonomi yang signifikan, metode kualitatif digunakan untuk mencari data yang dibutuhkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Temuan penulis menunjukkan bahwa tingkat akurasi dalam penerbitan SP2D masih perlu ditingkatkan, dengan ketidaksesuaian anggaran yang dialokasikan dan penggunaan dana yang sebenarnya. Selain itu, proses penerbitan SP2D cenderung mengalami keterlambatan, yang dapat menghambat kelancaran kegiatan pembangunan. Faktor-faktor penyebab termasuk keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, serta kurangnya komunikasi dari OPD terkait. Saran penulis mencakup peningkatan pelatihan dan sumber daya manusia, implementasi sistem informasi teknologi, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Upaya-upaya ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kinerja pengelolaan keuangan dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Sorong Selatan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah setempat untuk memprioritaskan peningkatan sumber daya manusia, teknologi, dan sistem informasi keuangan untuk mencapai efektivitas yang lebih baik dalam penerbitan SP2D dan pengelolaan keuangan secara keseluruhan.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor pendukung dan penghambat dari kinerja pegawai negeri sipil pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sorong Selatan, dilihat dari tingkat kedisiplinan yang masih sangat kurang serta kemampuan pegawai dalam menjalankan teknologi seperti komputer juga belum menguasainya dengan baik serta sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya memadai

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sorong Selatan, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa efektivitas kinerja pengelolaan keuangan dalam menerbitkan surat perintah pencairan dana (sp2d) dapat ditingkatkan melalui beberapa indikator yakni kompetensi teknis, akses terhadap pelayanan, hubungan interpersonal, dan kenyamanan. Selain itu terdapat juga beberapa faktor penghambat yakni SDM yang terbatas, kurangnya infrastruktur TIK, kurangnya koordinasi opd yang terlibat, perbedaan

interpretasi dan kompleksitas peraturan perundangan, serta kurangnya disiplin dari pihak-pihak terkait dalam proses penerbitan sp2d.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian dikarenakan rentan waktu penelitian kurang lebih 14 Hari.

Arah Masa Depan Penelitian. Penulis menyadari bahwa masih awalnya temuan penelitian, oleh sebab itu penulis menyarankan untuk bisa dilakukan penelitian lanjut pada lokus serupa yang berkaitan langsung dengan efektivitas kinerja pengelolaan keuangan dalam penerbitan sp2d di Kabupaten Sorong Selatan.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sorong Selatan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang telah banyak membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.



VI. DAFTAR PUSTAKA

D Suwanda, B Ali Junjuran, A Affandi, E Rusliati. 2019. *Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Publik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Sinurat Marja. 2017. *Perencanaan dan Penganggaran Daerah*. Bandung: Pustaka Rahma

Sinurat Marja. 2016. *Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua*. Bandung: Pustaka Rahmat

Moleong. 2017. *Teori dan Metode Penelitian Kualitatif*. New York, Bandung: Humanities Press, PT Remaja Rosdakarya

Sugiyono. 2018. *Teknik Analisis Data Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta

Wanarto. 2013. *Manajemen Pelayanan: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Syafri (2015) "Akuntabilitas Pelayanan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Takalar". Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif.

Brigita Erika Montolalu 2022 NPP. 29.1483 "Kinerja Keuangan Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara".

Anastasia Ivana Ngangi, Sri Murni, Victoria N. Untu (2018) "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan".
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/22227>

Kisman Lantang (2010) dalam penelitiannya yang berjudul "Sistem Pencairan Dana Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Poso". <https://adoc.pub/sistem-pencairan-dana-pada-badan-pengelola-keuangan-daerah-k.html>

Bustan (2007) telah menguji secara parsial, dengan judul "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Parepare."
<https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/7244/>

Magdalena Idda Kusumaningsih, (2016) “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pada Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Bulungan”
<https://repository.ut.ac.id/6556/>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun Anggaran 2021

